

BAB I

PENDAHULUAN

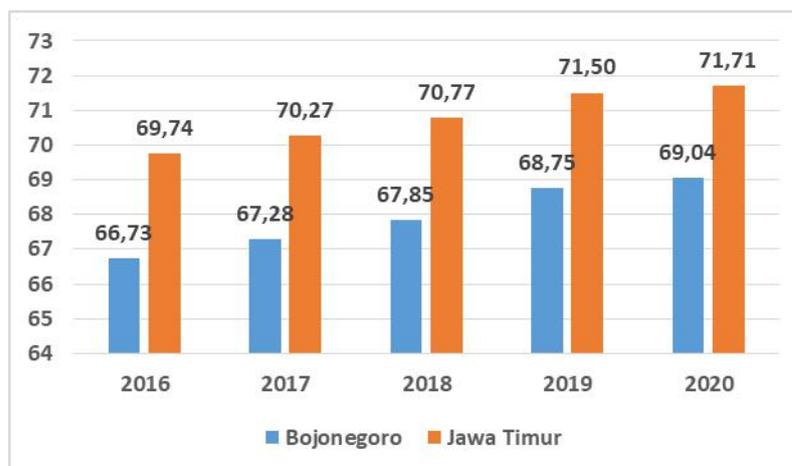
1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi maupun pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu pelaku pembangunan, sebab jumlah penduduk di dalam suatu negara merupakan unsur utama dalam pembangunan (Hasan, dkk., 2020). Pembangunan SDM merupakan salah satu tujuan utama bagi negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini sejalan dengan kondisi saat ini, dimana visi negara Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Rustan, 2019). Pandangan ekonomi baru menganggap pertumbuhan ekonomi semata tidak dapat dijadikan sebagai tujuan utama pembangunan, melainkan perlu diperhatikan mengenai pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Hasan, dkk., 2020). Konsep ini menjadi cikal bakal munculnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi (Surya, 2018). *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan IPM atau *Human Development Index* (HDI) pertama kali pada tahun 1990. IPM merupakan salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Hasan, dkk., 2020). Di Indonesia, pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita tiap daerah Provinsi/Kota yang disesuaikan (BPS, 2020). Ada 5 (lima) provinsi yang berhasil mempertahankan IPM di atas rata-rata nasional, mengalami penyusutan IPM dibanding tahun sebelumnya. Wilayah tersebut salah satunya adalah Jawa Timur dengan pencapaian IPM di titik 80,77 poin. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Timur menyusul secara berturut-turut memiliki 79,97 poin dan 76,24 poin (BPS, 2021).

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 1.344.038 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 1.331.077 jiwa, maka mengalami pertambahan sebesar 12.961 jiwa dalam kurun waktu 1 tahun. Pertambahan penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah 0,96 persen. Meningkatnya jumlah penduduk ini didasarkan kelahiran, migrasi dan pertumbuhan ekonomi (<https://bojonegorokab.go.id>, 2021). Untuk informasi lebih jelas lihat gambar berikut:



Gambar 1.1 IPM Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bojonegoro
Sumber : BPS Jatim 2020 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, angka IPM Jawa Timur dan Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 naik dari tahun 2019. IPM Bojonegoro tahun ini tercatat 69,04, sementara pada tahun 2019, IPM Bojonegoro tercatat 68,75. Nilai IPM tahun 2020 ini menempatkan Bojonegoro berada pada urutan ke 13 dari Kabupaten di Jawa Timur dengan angka IPM terendah. Dan dikategorikan sebagai kelompok IPM sedang (Syafik, 2021). Berdasarkan data yang dipublikasikan Bojonegoro Dalam Angka tahun 2021, IPM Kabupaten Bojonegoro terus naik dari tahun ke tahun. Tahun 2016, IPM Bojonegoro hanya 66,73, tahun 2017 naik menjadi 67,28, tahun 2018 naik lagi menjadi 67,85, tahun 2019 naik menjadi 68,75 dan tahun 2020 berada pada angka 69,04 (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2020). Tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah mulai berpihak pada peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten bojonegoro

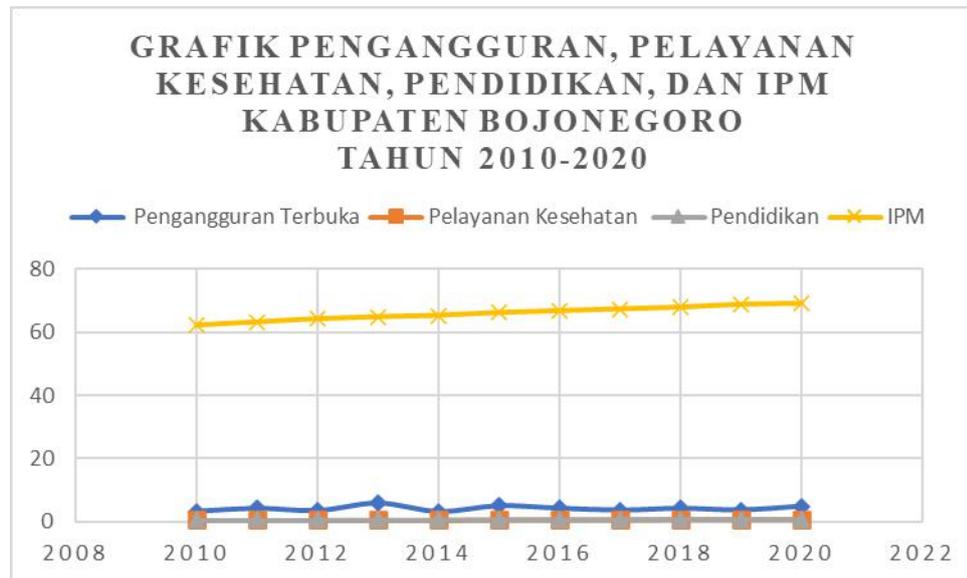
Keberhasilan pembangunan manusia dapat diketahui dari beberapa faktor yang mendukung IPM. Ada 3 (tiga) indikator yang mendukung IPM yaitu tingkat

ekonomi yang baik, kesehatan yang diperoleh masyarakat dengan baik, dan pendidikan yang dicapai. Ketiga indikator inilah yang menjadi tujuan utama keberhasilan pada tingkat pembangunan manusia. Jika dilihat dari indikator tingkat ekonomi, aspek pengangguran kerap menjadi faktor yang memengaruhi IPM. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Sama halnya seperti kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka ini akan berpengaruh pada daya beli masyarakat sehingga membuat pertumbuhan ekonomi akan stagnan, bahkan turun sehingga masalah pengangguran harus diselesaikan dalam rangka memacu naiknya laju pertumbuhan ekonomi (Handayani, 2018). Tingkat pengangguran Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dilansir Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, bahwa jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bojonegoro pada semester pertama atau hingga akhir Juni 2020 mencapai 39.182 orang atau setara 5.56 persen. Jumlah pengangguran terbuka tersebut terdiri dari pengangguran terbuka sebelum adanya pandemi COVID-19 atau yang bukan terdampak COVID-19 (pencari kerja baru) yaitu sebanyak 26.071 orang (3,70 persen), dan pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19, sebesar 13.111 orang (1,86 persen). Dari jumlah pengangguran tersebut, 22.187 (53,79%) berasal dari lulusan SMA sederajat, 7.454 (18,07%) berasal dari lulusan SMP sederajat, 4.569 (11,07%) berasal dari lulusan Diploma, 3.892 (9,43%) dan 3.153 (7,64%) dari lulusan SD sederajat (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2020). Tingkat pengangguran yang tinggi tersebut didasarkan fakta Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05

persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa (radarbangsa.com, 2021).

Disamping pengangguran, IPM juga dipengaruhi akses untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Kesehatan masyarakat merupakan salah satu alat kebijakan penting dalam memerangi kemiskinan. Akses terhadap perawatan kesehatan merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi (Rustan, 2019). Oleh karenanya perlu adanya jaminan kesehatan. Dalam hal ini jaminan kesehatan merupakan pendorong pembangunan dan strategi penting dalam penanggulangan kemiskinan. Tingkat kesehatan Kabupaten Bojonegoro dapat diketahui dari jumlah pengunjung puskesmas di Kabupaten Bojonegoro tertinggi berada pada tahun 2020 sebanyak 135.886 ribu jiwa dan terendah pada tahun 2018 sebanyak 2002 ribu jiwa. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 jumlah pengunjung puskesmas menunjukkan hasil positif dimana terjadinya peningkatan secara terus menerus dari tahun 2018 sampai tahun 2020 (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2020). Nilai positif tingkat kesehatan Kabupaten Bojonegoro tersebut dapat dilihat dari kebijakan dalam bidang kesehatan dengan membuat kartu BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) bagi semua kalangan untuk membantu masyarakat mendapatkan hidup yang sehat. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh masyarakat bisa mendapatkan pengobatan yang baik. Penanganan pada pengguna BPJS juga tidak dibedakan dengan penanganan tanpa BPJS karena pemerintah sendiri sudah mengharuskan setiap masyarakat menggunakan BPJS termasuk BPJS ketenagakerjaan.

Sejalan dengan tingkat pengangguran dan kesehatan, tingkat pendidikan adalah faktor yang dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha pembangunan yang lebih hijau dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga mudah tercapai. Apabila tingkat pendidikan rendah maka akan membuat masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Anggota masyarakat mungkin akan memilih jalan lain untuk mendapatkan uang seperti menjadi seorang pengemis, mencuri, bahkan mereka sendiri mampu menjual diri. Masyarakat menyadari bahwa tingginya biaya pendidikan dan rendahnya pendapatan yang didapat akan membuat masyarakat tidak bisa mendapat pendidikan bahkan yang sudah sekolah harus putus sekolah. Tingkat pendidikan Kabupaten Bojonegoro dapat diketahui dari jumlah lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kabupaten Bojonegoro tertinggi berada pada tahun 2020 sebanyak 35.664 ribu jiwa dan terendah pada tahun 2016 sebanyak 11.332 ribu jiwa. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020 jumlah lulusan menunjukkan hasil positif dimana terjadinya peningkatan secara terus menerus dan hanya satu kali penurunan ditahun 2016 dimana dari semula 11.340 ribu jiwa menjadi 11.332 ribu jiwa. Untuk periode tahun sesudahnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2020).



Gambar 1.2 Grafik Pengangguran, Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan IPM Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2020

Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro 2020 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, angka pengangguran Kabupaten Bojonegoro mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Adapun pengangguran pada tahun 2018 tercatat di angka 4,19, kemudian turun pada tahun 2019 pada angka 3,7 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 pada angka 4,92. Selanjutnya pelayanan kesehatan berada pada angka yang stabil pada tahun 2018-2020 yaitu pada angka 0,79. Sedangkan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,57, pada tahun 2019 sebesar 0,58, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada angka 0,59. Sejalan dengan IPM di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 67,85, pada tahun 2019 sebesar 68,75, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada angka 69,04.

Pengaruh pengangguran, kesehatan, dan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menarik perhatian beberapa ekonomi untuk

melakukan penelitian. Penelitian Siswati & Hermawati (2018) mengemukakan bahwa ada pencapaian komponen IPM Kabupaten Bojonegoro dilihat dari aspek: tingkat kesehatan penduduk, tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk serta kemampuan daya beli (standar kelayakan hidup) penduduk. Di lain pihak, penelitian Handayani (2018) tentang “Analisis dampak pendidikan, kesehatan dan tingkat pengangguran di Bojonegoro untuk 2002-2015”. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki korelasi negatif terhadap variabel kemiskinan. Untuk variabel pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap variabel kemiskinan di Bojonegoro pada tahun 2002-2015. Apabila dilihat dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro, penelitian terakhir hanya sampai dengan tahun 2015. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yakni penelitian ini membahas pengaruh pengangguran, pelayanan kesehatan dan pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2010-2020.

Berdasar paparan di muka, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi IPM yaitu tingkat pendidikan, kesehatan dan pengangguran di Kabupaten Bojonegoro. Melihat permasalahan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh Pengangguran , Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bojonegoro ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro ?
2. Apakah Pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro ?
3. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pelayanan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen sedangkan untuk Pengangguran, Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan sebagai variabel independen.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan secara topik penelitian, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengaruh Pengangguran, Pelayanan kesehatan, dan Pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan ataupun sebagai pertimbangan dalam melanjutkan program yang diberikan oleh pemerintah agar meningkatkan indeks pembangunan manusia.